

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tata Kelola Perusahaan merupakan salah satu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. Tata kelola perusahaan yang baik juga merupakan salah satu indikator dari pembentukan suatu citra perusahaan dimana perusahaan yang aktif dalam mengimplementasikan dan menyuarakan praktik-praktik tata kelola perusahaan berpeluang lebih besar dalam menciptakan bisnis yang berkesinambungan.

Bank Dunia (1999), menyatakan bahwa tata kelola perusahaan terdiri dari dua mekanisme, yaitu tata kelola perusahaan internal dan eksternal. Tata kelola perusahaan internal, mengutamakan kepentingan pemegang saham, beroperasi di dewan direksi untuk memonitor manajemen puncak. Disisi lain, tata kelola perusahaan eksternal memonitor dan mengontrol perilaku manajer melalui peraturan dan kekuatan pihak luar. Banyak pihak yang terlibat, seperti pemasok, debitur, akuntan, pengacara, penyedia kredit, dan lembaga profesional (Wu *et al.*, 2006).

Perhatian terhadap praktik tata kelola perusahaan di perusahaan modern telah meningkat akhir-akhir ini. Sejak adanya krisis finansial di berbagai negara di tahun 1997-1998 yang diawali krisis di Thailand, Jepang, Korea, Indonesia, Malaysia, Hongkong, dan Singapura yang akhirnya berubah menjadi krisis finansial Asia ini

dipandang sebagai akibat lemahnya praktik tata kelola perusahaan yang baik (Arifin, 2005).

Skandal keuangan terjadi di negara maju, seperti di Amerika Serikat dengan adanya keruntuhan perusahaan-perusahaan besar seperti Enron Corporation dan Worldcom. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Kasus skandal Enron terjadi pada tahun 2001. Diketahui bahwa manajemen Enron memanipulasi angka-angka laporan keuangan, melebih-lebihkan laba bersih dan menutupi hutang perusahaan. Worldcom merupakan perusahaan penyedia layanan telepon jarak jauh. Dalam laporan keuangan Worldcom ditemukan bahwa perusahaan mengklasifikasikan lebih dari US\$ 3,8 milyar untuk beban operasional dibukukan sebagai pengeluaran modal. Dilaporkan sekitar US\$ 3.005 milyar telah salah diklasifikasi pada tahun 2001, sementara sisanya sekitar US\$ 797 juta pada triwulan pertama tahun 2002. Dengan memindahkan akun beban kepada akun modal, Worldcom mampu menaikkan pendapatan atau laba (Yvesrey, 2011).

Tata kelola perusahaan yang baik akhirnya menjadi isu penting, terutama di Indonesia. Banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan emiten di pasar modal yang ditangani Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) menunjukkan rendahnya mutu praktik tata kelola perusahaan di Indonesia. Pada tahun 2001 terjadi insider trading atas saham PT Bank Central Asia. Insider trading adalah salah satu perilaku buruk yang dilakukan orang dalam PT Bank Central Asia pada

proses transaksi saham. Hal ini terlihat dalam bentuk gejolak di dalam transaksi dan pergerakan harga saham bank menjelang rencana divestasi (Arifin, 2005).

Contoh lainnya adalah terungkapnya kasus mark-up laporan keuangan PT Kimia Farma yang overstated pada tahun 2002, yaitu adanya penggelembungan laba bersih tahunan senilai Rp 32,668 miliar. Kasus ini melibatkan sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menjadi auditor perusahaan tersebut ke pengadilan (Arifin, 2005).

Dampak pengelolaan tata kelola perusahaan yang buruk juga dapat diambil dari pelajaran Batavia Air. Salah satu maskapai penerbangan di Indonesia ini telah dinyatakan pailit akibat ketidakmampuannya dalam melunasi utang yang mencapai jutaan dollar. Tanggung jawab manajerial baik pemegang saham, dewan direksi hingga komisaris yang buruk dan kurangnya transparansi keadaan perusahaan menghambat Batavia Air dalam proses pengelolaan aset dan struktur keuangan dalam rangka operasionalisasi dan perbaikan secara kontinu. Ketidakefisienan tersebut pada akhirnya mendorong Batavia Air pada konsekuensi untuk menghadapi masalah dalam tata kelola perusahaan yang tak terpecahkan (Kompasiana, 2013).

Permasalahan juga terjadi di dalam keuangan laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk disebabkan adanya tiga buah laporan keuangan yang dinyatakan telah diaudit, tetapi di antara ketiganya terdapat perbedaan. Dari ketiga laporan keuangan tersebut hanya ada satu laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diaudit. Sedangkan dua laporan keuangan lainnya belum diaudit. PT Bank Lippo Tbk telah melanggar prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas. Pelanggaran ini

ditunjukkan dengan mencantumkan kata “audited” di dalam laporan keuangan yang sebenarnya belum diaudit (Rachmawati, 2013).

Pada Agustus 2010 lalu, salah satu pemegang saham Katarina, PT Media Intertel Graha (MIG), dan Forum komunikasi Pekerja Katarina (FKPK) melaporkan telah terjadi penyimpangan dana hasil Initial Public Offering (IPO) yang dilakukan oleh manajemen PT Katarina Utama Tbk (RINA). Dana yang sedianya akan digunakan untuk membeli peralatan, modal kerja, serta menambah kantor cabang, tidak digunakan sebagaimana mestinya (Syaif, 2010).

Kasus terbaru adalah terungkapnya skandal Waskita Karya, salah satu BUMN Jasa Konstruksi yang diduga melakukan rekayasa laporan keuangan. Direktur Utama Waskita yang baru, M. Choliq yang sebelumnya menjabat Direktur Keuangan PT Adhi Karya Tbk, menemukan pencatatan yang tidak sesuai, dimana ditemukan kelebihan pencatatan Rp 400 miliar. Direksi periode sebelumnya melakukan rekayasa keuangan sejak tahun buku 2004 - 2008 dengan memasukkan proyeksi pendapatan proyek multi tahun ke depan sebagai pendapatan tahun tertentu (Pandu, 2012).

Pentingnya tata kelola perusahaan yang baik untuk kesuksesan perusahaan tidak dapat dipungkiri. Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap masalah ini diwujudkan dengan didirikannya *Indonesian Institute For Corporate Governance* (IICG) pada tahun 2000, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada akhir tahun 2004 dan menandatangani Nota Kesepakatan (*Letter of Intent*) dengan *International Monetary Fund* (IMF). Dalam “CG Watch 2012: Market Rankings

Indonesia menempati posisi terakhir dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia (Market Rangings, 2012).

Berdasarkan pemaparan kasus-kasus di atas, bisa disimpulkan bahwa betapa pentingnya suatu tata kelola perusahaan yang baik terhadap kinerja perusahaan nantinya. Dari contoh kasus-kasus di atas bisa dilihat bahwa walaupun pada awalnya perusahaan memiliki modal yang besar, namun karena didalam pengelolaannya terdapat penyimpangan-peyimpangan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain menyebabkan perusahaan mengalami kerugian yang berujung kebangkrutan.

Selain pentingnya tata kelola perusahaan, yang tidak menjadi kalah pentingnya adalah mengenai kegiatan sosial. Saat ini keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya dilihat dari tingkat laba yang didapatkan oleh perusahaan tersebut, namun juga dari tanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan perusahaan baik dalam bidang sosial, kesehatan maupun lingkungan. Pentingnya aktivitas dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* juga mendapatkan perhatian dari pemerintah, hal tersebut dapat dilihat dari Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan tentang pengungkapan *Corporate Social Responsibility* bagi Perseroan terbatas.

UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 dan 74, pada pasal 66 ayat 2 bagian c tertulis bahwa selain laporan keuangan, dalam laporan tahunan perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dan dalam pasal 74 menyatakan bahwa setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Di Indonesia masalah pencemaran lingkungan masih banyak terjadi seperti kasus PT Nusa Halmahera Minerals Ltd Perusahaan tambang yang melakukan aktivitas produksi emas ini berlokasi di Pulau Halmahera. Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan menghasilkan lubang bekas pertambangan seperti di lubang tambang (pit) Gosowong, dibiarkan begitu saja, serta longsoran yang dapat menimbulkan air asam tambang dan berpotensi mencemari badan sungai Tobobo. Limbah PT NHM juga mencemari teluk KAO. Yang mengakibatkan ikan teri dan udang kecil mati.

Serta kasus yang terjadi pada PT Freeport Indonesia yang terletak di Papua. Pencemaran yang terjadi di Freeport di antaranya pencemaran tanah dan air sehingga menimbulkan kerugian terutama bagi kelangsungan ekologi dan masyarakat sekitar (Global Future Institute, 2009).

Pencemaran lingkungan akibat dari aktivitas yang dilakukan perusahaan, menimbulkan tekanan dari berbagai pihak khususnya masyarakat terhadap perusahaan agar perusahaan memberikan informasi yang transparan mengenai aktivitas lingkungannya didalam laporan tahunan perusahaan (Anggraini, 2006). Sun *et al.*, (2010) menyatakan bahwa pengungkapan sukarela dalam *annual report* seperti pengungkapan lingkungan perusahaan atau yang sering disebut dengan *corporate environmental disclosure* dipandang perlu untuk menunjukkan kepada *stakeholders* akan kesadaran perusahaan dari kepentingan yang lebih luas dan akuntabilitas dengan cara berperilaku tanggung jawab sosial. Semakin banyaknya bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya, maka

image perusahaan menurut pandangan masyarakat menjadi meningkat atau citra perusahaan menjadi baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut lah, maka penulis akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja dan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.**

1.2 Permasalahan Penelitian

Permasalahan penelitian yang akan diteliti mengenai pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap *Tobin's Q* dan tanggung jawab sosial adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Tobin's Q*?
2. Apakah terdapat pengaruh direktur independen terhadap *Tobin's Q*?
3. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *Tobin's Q*?
4. Apakah terdapat pengaruh komposisi dewan komisaris terhadap *Tobin's Q*?
5. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Tobin's Q*?
6. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap tanggung jawab sosial?
7. Apakah terdapat pengaruh direktur independen terhadap tanggung jawab sosial?
8. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tanggung jawab sosial?
9. Apakah terdapat pengaruh komposisi dewan terhadap tanggung jawab sosial?

10. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap tanggung jawab sosial?
11. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap tanggung jawab sosial yang di moderasi oleh *turnover* karyawan?
12. Apakah terdapat pengaruh direktur independen terhadap tanggung jawab sosial yang di moderasi oleh *turnover* karyawan?
13. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tanggung jawab sosial yang di moderasi oleh *turnover* karyawan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Tobin's Q*.
2. Untuk mengetahui pengaruh direktur independen terhadap *Tobin's Q*.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *Tobin's Q*.
4. Untuk mengetahui pengaruh komposisi dewan komisaris terhadap *Tobin's Q*.
5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Tobin's Q*.
6. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan insitusional terhadap tanggung jawab sosial.
7. Untuk mengetahui pengaruh direktur independen terhadap tanggung jawab sosial.
8. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tanggung jawab sosial.

9. Untuk mengetahui pengaruh komposisi dewan komisaris terhadap tanggung jawab sosial.
10. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap tanggung jawab sosial.
11. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap tanggung jawab sosial yang di moderasi oleh *turnover* karyawan.
12. Untuk mengetahui pengaruh direktur independen terhadap tanggung jawab sosial yang di moderasi oleh *turnover* karyawan.
13. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tanggung jawab sosial yang di moderasi oleh *turnover* karyawan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan bahwa dengan menerapkan atau mempraktikkan tata kelola perusahaan yang baik dan mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, maka dapat meminimalkan biaya agensi, meminimalkan biaya modal, meningkatkan nilai saham perusahaan dan mengangkat citra perusahaan.

2. Bagi dunia akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh tata kelola perusahaan (karakteristik

dewan, struktur kepemilikan, dan rasio keuangan) terhadap kinerja perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor untuk memahami dan mengerti mengenai kinerja perusahaan. Sehingga investor dapat memutuskan perusahaan mana yang lebih bagus untuk berinvestasi.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan uraian secara umum mengenai isi dan pembahasan setiap bab yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, serta sistematika pembahasan dari penyusunan skripsi ini.

BAB II : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini memberikan uraian secara sistematis mengenai model penelitian terdahulu, kinerja perusahaan, tanggung jawab sosial, pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, model penelitian yang dikembangkan penulis dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang rancangan dan objek penelitian, definisi operasional variabel yang akan diuji dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diperlukan serta metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menunjukkan hasil pengujian data memberikan penjelasan mengenai hasil dari hipotesis yang telah diuji tersebut.

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh penulis dari hasil penyusunan skripsi dan keterbatasan dari penelitian ini serta rekomendasi yang dapat diberikan untuk menunjang penelitian selanjutnya.